BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk menganalisis penerapan prinsip *Good Tourism Governance* menurut Bambang Sunaryo (2013) dalam pengembangan Ekowisata Kampung Blekok Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Tourism Governance* telah dilaksanakan melalui berbagai program pengelolaan kawasan berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Namun demikian, implementasi beberapa prinsip masih menghadapi berbagai kendala sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Adapun kesimpulan dari masing-masing prinsip adalah sebagai berikut.

1. Partisipasi Masyarakat

   Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Ekowisata Kampung Blekok telah diwujudkan sejak tahap perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan program. Masyarakat terlibat sebagai anggota Pokdarwis, pelaku UMKM, pengelola homestay, pemandu wisata, petugas parkir, maupun tenaga kebersihan. Akan tetapi, tingkat partisipasi masyarakat masih bersifat fluktuatif dan cenderung dipengaruhi oleh kondisi kunjungan wisatawan. Ketika aktivitas wisata mengalami penurunan, keterlibatan sebagian masyarakat juga ikut menurun sehingga partisipasi belum berlangsung secara konsisten.

2. Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

Pengembangan Ekowisata Kampung Blekok telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, Pemerintah Desa Klatakan, Pokdarwis, masyarakat, serta PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia (PT POMI) melalui program CSR. Masing-masing pihak menjalankan peran sesuai kewenangannya melalui penyusunan regulasi, pembangunan fasilitas, pemberdayaan masyarakat, pendampingan, serta koordinasi program. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keterlibatan pemangku kepentingan telah diterapkan dengan baik dan menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan.

3. Kemitraan Kepemilikan Lokal

Penerapan prinsip kemitraan kepemilikan lokal telah memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat melalui usaha kerajinan, homestay, perdagangan, penyewaan jasa, serta keterlibatan dalam operasional wisata. Pengembangan Ekowisata Kampung Blekok mampu menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki. Meskipun demikian, manfaat ekonomi tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat sehingga masih diperlukan perluasan kesempatan usaha dan penguatan kapasitas masyarakat.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berkelanjutan

Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan telah diarahkan pada prinsip keberlanjutan melalui pelestarian kawasan mangrove, perlindungan habitat burung air, pembagian zona konservasi dan wisata, serta penyediaan berbagai fasilitas penunjang wisata. Namun, implementasi prinsip

ini masih menghadapi tantangan berupa kerusakan beberapa fasilitas akibat banjir serta belum optimalnya pengelolaan kebersihan kawasan yang ditunjukkan dengan masih ditemukannya sampah pada area mangrove. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah mengarah pada keberlanjutan, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pemeliharaan dan pengawasan.

5. Akomodasi Aspirasi Masyarakat

Pengelola telah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui rapat koordinasi, forum evaluasi, maupun komunikasi informal. Aspirasi masyarakat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian berbagai permasalahan pengelolaan wisata, seperti penataan sistem parkir dan penanganan persoalan lingkungan. Namun, menurunnya intensitas forum evaluasi akibat berkurangnya aktivitas wisata menyebabkan kesempatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi menjadi tidak seintensif sebelumnya.

6. Daya Dukung Lingkungan

Prinsip daya dukung lingkungan telah diterapkan melalui penyediaan fasilitas wisata yang memadai, pelestarian ekosistem mangrove, kegiatan penanaman mangrove secara berkala, perlindungan habitat burung air, serta kegiatan penyelamatan burung yang didukung oleh izin penangkaran dari BKSDA. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan telah memperhatikan keseimbangan antara fungsi konservasi dan aktivitas wisata sehingga daya dukung lingkungan relatif tetap terjaga.

7. Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Pokdarwis, pemerintah desa, dan PT POMI untuk membahas perkembangan kunjungan wisata, pelaksanaan program, serta berbagai kendala di lapangan. Akan tetapi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang sebelumnya dilakukan secara rutin mengalami penurunan intensitas sehingga efektivitas pengawasan terhadap perkembangan kawasan wisata menjadi kurang optimal.

8. Akuntabilitas Lingkungan

Pengelolaan Ekowisata Kampung Blekok telah menunjukkan penerapan akuntabilitas lingkungan melalui penyusunan laporan kegiatan, dokumentasi program konservasi, pelaksanaan rehabilitasi mangrove, serta pengelolaan kawasan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, akuntabilitas masih lebih berorientasi pada pertanggungjawaban administratif antar lembaga dibandingkan penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat.

9. Pelatihan kepada Masyarakat

Berbagai pelatihan telah diberikan kepada masyarakat, seperti pelatihan pemandu wisata, pengelolaan sampah, pengolahan produk mangrove, perhotelan, *branding*, hingga pelatihan ekspor produk UMKM. Pelatihan tersebut menunjukkan adanya komitmen dalam meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu berperan dalam pengembangan wisata berkelanjutan.

Namun, keberlanjutan hasil pelatihan masih dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan kondisi perkembangan sektor pariwisata.

10. Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan

Promosi Ekowisata Kampung Blekok telah dilakukan melalui berbagai media digital, penyelenggaraan festival, program edukasi lingkungan, serta kerja sama dengan pemerintah dan berbagai pihak. Promosi tersebut mengangkat nilai konservasi, budaya lokal, dan identitas masyarakat pesisir sebagai bagian dari daya tarik kawasan. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam aktivitas promosi masih perlu diperkuat agar promosi tidak hanya bergantung pada pemerintah maupun pengelola.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip *Good Tourism Governance* dalam pengembangan Ekowisata Kampung Blekok dapat dikategorikan cukup baik, karena seluruh prinsip telah diimplementasikan dalam pengelolaan kawasan. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Kendala utama yang masih dihadapi meliputi fluktuasi partisipasi masyarakat, belum meratanya manfaat ekonomi, berkurangnya intensitas monitoring dan forum evaluasi, keterbatasan pemeliharaan fasilitas akibat keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya pengelolaan kebersihan kawasan mangrove. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan Ekowisata Kampung Blekok ke depan tidak hanya bergantung pada keberadaan potensi alam yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kolaborasi, menjaga konsistensi pemberdayaan masyarakat, serta mempertahankan keseimbangan antara tujuan konservasi dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

5.2 Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada analisis sejauh mana penerapan prinsip *Good Tourism Governance* dalam pengembangan Ekowisata Kampung Blekok Kabupaten Situbondo. Penelitian ini tidak mengukur tingkat efektivitas masing-masing program maupun dampaknya secara kuantitatif terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji keterlibatan salah satu mitra swasta, yaitu PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia (PT POMI), dari keseluruhan mitra yang berkontribusi dalam pengembangan Ekowisata Kampung Blekok. Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan melalui kajian yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan serta pendekatan penelitian yang lebih komprehensif

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, diperlukan penguatan konsistensi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama seluruh pemangku kepentingan. Monitoring tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus mencakup aspek yang lebih substantif seperti kondisi fasilitas wisata, kualitas kebersihan kawasan, efektivitas program pemberdayaan masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem mangrove sebagai daya tarik utama Ekowisata Kampung Blekok. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen korektif dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata.
2. Bagi Pemerintah Desa Klatakan dan Pokdarwis Kampung Blekok, penguatan partisipasi masyarakat perlu diarahkan tidak hanya pada aspek

keterlibatan formal, tetapi juga pada peningkatan komitmen dan konsistensi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih cenderung fluktuatif dan sering kali bergantung pada intensitas aktivitas wisata. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya hadir dalam tahap pelaksanaan, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab dalam proses perencanaan dan evaluasi pengelolaan kawasan wisata. Penguatan kapasitas kelembagaan lokal juga menjadi penting agar Pokdarwis mampu menjadi penggerak utama yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar fungsional dalam tata kelola wisata berbasis masyarakat.

3. Bagi seluruh pemangku kepentingan, diperlukan penguatan kolaborasi dalam pemeliharaan sarana dan prasarana wisata, khususnya fasilitas yang rentan mengalami kerusakan akibat banjir, seperti *jetty* kayu. Selain itu, pengelolaan kebersihan kawasan perlu diperkuat melalui sistem pengawasan yang lebih terstruktur, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan. Hal ini penting agar keberlanjutan ekowisata tidak hanya ditentukan oleh daya tarik alam, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan lingkungan yang konsisten.

4. Bagi masyarakat sekitar Ekowisata Kampung Blekok, diperlukan peningkatan sikap adaptif terhadap perkembangan sektor pariwisata yang terus mengalami perubahan. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama yang menentukan

keberlanjutan kawasan wisata. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum sepenuhnya konsisten, baik dalam aspek keterlibatan menjaga kebersihan, mendukung kegiatan wisata, maupun dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam membangun kesadaran kolektif dan komitmen jangka panjang masyarakat terhadap pengelolaan ekowisata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan nilai kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap kawasan wisata, sehingga masyarakat tidak hanya terlibat secara situasional, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga keberlanjutan Ekowisata Kampung Blekok.

5. Bagi PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia (PT POMI) dan mitra pembangunan lainnya, program pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan melalui pendampingan pasca pelatihan, pengembangan UMKM, peningkatan kualitas homestay, pemasaran produk lokal, serta diversifikasi usaha berbasis potensi kawasan. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari keberadaan Ekowisata Kampung Blekok dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

6. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai tata kelola Ekowisata Kampung Blekok dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti *Collaborative Governance*, *Community Based Tourism*, atau *Sustainable Tourism Governance*. Penelitian selanjutnya juga diharapkan melibatkan seluruh mitra yang berperan dalam

pengembangan Ekowisata Kampung Blekok, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pola kolaborasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur efektivitas penerapan *Good Tourism Governance* terhadap keberlanjutan kawasan ekowisata.